

Pemberdayaan Tenaga Kerja Disabilitas Di Kota Mamasa Provinsi Sulawesi Barat

Empowerment of Disabled Workers in Mamasa City, West Sulawesi Province

Yonas Matalangi*, Natsir Tompo, Ade Ferry Afrisal

Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

*email: yonas.m.matalangi@gmail.com

Diterima: 10 September 2023 / Disetujui : 30 Januari 2024

Abstrak

Pemberdayaan Tenaga Kerja Disabilitas Di Kota Mamasa Sulawesi Barat. Pemberdayaan penyandang disabilitas mengacu pada pemberdayaan kelompok disabilitas sebagai kelompok sosial yang memiliki potensi sebagaimana manusia lain pada umumnya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan tenaga kerja disabilitas di kota Mamasa dan mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan tenaga kerja disabilitas di Kota Mamasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan tehnik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan tenaga disabilitas kerja di Kota Mamasa dilakukan dengan beberapa program yaitu sosialisasi, pelatihan menenun dan menjahit, dan pelatihan membuat kerajinan dari barang bekas. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Mamasa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat.

Kata Kunci: Disabilitas, Pemberdayaan, Tenaga Kerja, Mamasa

Abstract

Empowerment of Disabled Workers in Mamasa City, West Sulawesi. Empowerment of people with disabilities refers to the empowerment of disabled groups as social groups who have potential like other humans in general. The research aims to understand the role of the government in empowering disabled workers in Mamasa City and to find out the factors that influence the empowerment of disabled workers in Mamasa City. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques using interview, documentation and observation techniques. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the research results, it can be concluded that the government's role in empowering workers with disabilities in Mamasa City is carried out with several programs, namely socialization, training in weaving and sewing, and training in making crafts from used goods. As for the factors that influence the empowerment of people with disabilities in Mamasa City, there are supporting factors and inhibiting factors.

Keywords: Disability, Empowerment, Labor



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Hak untuk mendapatkan pekerjaan adalah milik setiap warga negara, tak terkecuali penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (1) Poin F yang mengatur mengenai hak memiliki pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi telah memuat pengakuan dan jaminan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai kehidupan yang layak. Pada dasarnya istilah pemberdayaan penyandang disabilitas mengacu pada pemberdayaan kelompok disabilitas sebagai kelompok sosial

yang memiliki potensi sebagaimana manusia lain pada umumnya. Pemberdayaan penyandang disabilitas dibangun di atas keyakinan bahwa dengan beberapa bentuk penyesuaian lingkungan, potensi-potensi yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas tentu saja bisa diaktualisasikan dengan optimal. Jika ditilik dari sudut pandang pemberdayaan, intervensi sosial bagi para penyandang disabilitas berhubungan erat dengan jenis dan tingkat disabilitas yang dialami mereka. Hal ini juga tampak dalam adagium tentang disabilitas yang terkenal, yaitu *nothing about us without us*. Memberdayakan penyandang disabilitas seharusnya dimulai dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan anatomis, mental dan sosial yang secara bersama-sama menghambat pemenuhan keberfungsian sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia, layanan sosial bagi penyandang disabilitas dapat dilihat pada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menghilangkan hambatan-hambatan sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas. Sejak tahun 2008 pemerintah Indonesia mulai menggunakan konsep ICF dalam mengidentifikasi kecacatan yang menyebabkan terjadinya disabilitas. Meskipun survey nasional baru dilakukan pada sembilan provinsi, di masa-masa mendatang pemerintah RI diharapkan untuk melakukan survey serupa secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Survey nasional yang dilakukan departemen sosial RI pada tahun 2008 diklaim menggunakan konsep ICF. Meski demikian, hasil survey tersebut tampaknya perlu untuk dikritisi mengingat beberapa kelemahan yang tampak dalam beberapa bagian dari klasifikasi dalam survey tersebut. Survey tersebut, misalnya, mengelompokkan penyandang disabilitas berusia 18-60 tahun dalam satu klaster. Penggabungan tersebut sepintas memang tidak tampak bermasalah, namun jika dicermati lebih jauh, menggabungkan penyandang disabilitas dalam rentang usia yang begitu beragam tersebut cenderung mengaburkan esensi dari masalah terkait disabilitas yang mereka hadapi. Hakikatnya pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari rekayasa pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat. Slamet dalam Anwas (2014) menekankan juga bahwa “Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya sendiri dan memperbaiki kehidupannya”.

Pada dasarnya pemberdayaan menyatakan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun otensi, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Hakikatnya pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk menaikkan partisipasi mereka dalam banyak bidang kehidupan sosial. Dimana, disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No.8 tahun 2006). Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik yang mempengaruhi kegiatan fisik orang tersebut.

Berdasarkan data berjalan 2021 dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar lima persen. Pada tahun 2018 berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengungkapkan bahwa akses

informasi penyandang disabilitas dalam penggunaan ponsel atau laptop hanya 38,89 persen, sedangkan non-disabilitas 81,61 persen. Adapun untuk akses internetnya penyandang disabilitas 8,50 persen sedangkan non-disabilitas sekitar 45,46 persen. Dari data tersebut, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa orang dengan penyandang disabilitas belum mendapatkan hak mereka sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini yaitu hak untuk berekspreasi, berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang terdapat dalam UU No.8 Tahun 2016 pasal 24 tentang penyandang disabilitas. Taraf pendidikan yang rendah serta keterampilan yang tak memadai, ketika dihadapkan dengan dunia kerja yang semakin kompetitif, membuat para penyandang disabilitas menuju pada kemiskinan. Penyandang disabilitas cenderung tidak diterima bekerja dan sulit untuk menciptakan usaha yang produktif. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kasus ini sangat-sangat jelas terjadi. Selain bersaing mendapatkan pekerjaan yang layak, penyandang disabilitas juga dituntut untuk bersaing dengan pengangguran lain yang bukan merupakan penyandang disabilitas. Dalam iklim persaingan yang tidak sepadan tersebut, mudah diketahui bahwa penyandang disabilitas umumnya keluar sebagai pihak yang terpinggirkan.

Daerah Sulawesi Barat khususnya di Mamasa, Dinas Sosial menyediakan program pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas bagi yang belum bekerja. Pemberdayaan merupakan salah satu langkah menuju arah yang lebih baik dimana memberikan atau membuat perubahan dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, serta memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Program Pemberdayaan yang pernah di programkan di Mamasa bagi penyandang disabilitas adalah latihan menenun dan membuat kerajinan dari barang bekas. Namun beberapa dari penyandang disabilitas tersebut sulit mengikuti program yang ada. Maka dari itu selain program menenun dan latihan membuat kerajinan dari barang bekas, Dinas Sosial juga mencoba mengembangkan dan menyesuaikan program pemberdayaan dengan melihat minat dan bakat yang dimiliki dari para penyandang disabilitas. Dinas Sosial mengadakan pemberdayaan ini karena dianggap mampu mengembangkan kemampuan dan mengasah kreatifitas bagi para penyandang disabilitas. Namun meskipun dengan adanya pemberdayaan tersebut masih belum mampu memberikan kesejahteraan bagi mereka. Dengan berakhirnya program tersebut, Dinas Sosial tenaga kerja tidak membuka peluang atau menyalurkan bakat para penyandang disabilitas kepada lembaga penyedia kerja. Pada akhirnya para penyandang disabilitas harus berusaha mandiri untuk mendapatkan pekerjaan dengan kemampuan mereka sendiri.

Upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Mamasa telah dilakukan namun belum memperoleh hasil yang cukup baik. Adapun faktor yang menjadi kendala bagi pemerintah Dinas Sosial dalam pemberdayaan tenaga kerja yaitu tidak semua penyandang disabilitas mampu menghasilkan kreatifitas yang sama dalam hal ini seperti latihan menenun dan membuat kerajinan dari barang bekas. Selain itu, meskipun pemerintah setempat khususnya Dinas Sosial telah mengembangkan program yang disesuaikan dengan minat dan bakat bagi sebagian dari mereka yang tidak memiliki minat dan bakat untuk menenun dan membuat barang kerajinan, namun juga belum efektif karena melihat minat dan bakat dari penyandang disabilitas yang beragam dan program yang dilakukan hanya bersifat sosialisasi saja tidak ada praktek secara langsung. Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena dalam upaya memberdayakan penyandang disabilitas diperlukan adanya persiapan lapangan pekerjaan untuk mereka agar bisa langsung bekerja. Sementara itu beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Mamasa baik perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan organisasi pemerintah masih menentukan persyaratan yang mendiskriminasi para pelamar kerja dari penyandang disabilitas.

Persyaratan tersebut berupa tinggi badan yang proporsional, penampilan yang menarik, serta melihat tingkat pendidikan.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan tenaga kerja disabilitas di kota Mamasa dan mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan tenaga kerja disabilitas di Kota Mamasa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut (Sudaryono 2018)) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data dan bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna pada generalisasi. Adapun Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Seperti data primer yang merupakan data yang didapatkan dari sumber data berupa pengamatan atau wawancara secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari wawancara pada pihak staff di Dinas Sosial Kabupaten Mamasa dan para penyandang disabilitas yang diberdayakan. Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan yaitu instrumen wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang dibuat sendiri oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah (1) Observasi, peneliti melakukan teknik observasi langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih dalam tentang fenomena yang sedang diteliti. (2) Wawancara, pada peneliti ini dilakukan wawancara secara langsung dengan informan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mamasa untuk mengetahui kedalaman informasi mengenai topik yang akan diteliti. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan subjek penelitian. Peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait masalah penelitian, kemudian informan dapat memberikan pernyataan yang sesuai dengan pertanyaan peneliti. Namun jika pertanyaan yang diberikan kurang jelas, maka pewawancara akan melakukan pertanyaan kembali dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar pernyataan yang diperoleh lebih akurat. Wawancara ini dilakukn dengan cara peneliti bertemu langsung dengan informan yakni Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamasa, Staff dan Penyandang disabilitas. (3) Dokumentasi, digunakan peneliti untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumentar, dan data yang relevan dengan penelitian.

Teknik Pengujian Keabsahan merupakan padanan dari keaslian (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri (Zuldafrial 2012). Keabsahan suatu data dapat dicapai dengan pengumpulan data yang tepat, salah satunya dengan metode triangulasi. Menurut Moleong (Rijali 2019), teknik yang digunakan untuk menentukan keabsahan data ialah jenis triangulasi sumber data, jenis teknik ini digunakan untuk membandingkan dan juga mengecek kembali informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Lebih mudahnya, teknik yang membandingkan hasil wawancara dan dengan hasil dokumentasi yang didapatkan dilapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup tahapan yaitu (1) Pengumpulan Data, Data yang didapatkan dari hasil WOD (Wawancar, Observasi, dan Dokumentasi). Hasil dituliskan dalam bentuk catatan lapangan, kemudian disalin dalam bentuk transkrip

(catatan terstruktur). (2) Reduksi Data, Ungkapan oleh Miles dan Huberman yang dikutip dari Citra (2020), bahwa Reduksi data ialah sebuah pemilihan, pemusatan perhatian di dalam penyederhanaan data, dan mengabstaksikan atau mentransformasikan data kasar yang muncul di dalam hasil wawancara. (3) Penyajian Data, Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. (4) Pengambilan Kesimpulan, menurut Sugiyono yang dikutip dari Samosir (2021), penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisa data. Penarikan kesimpulan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah, setiap kesimpulan diuji kebenarannya dari temuan-temuan yang ditemukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran pemerintah dalam mewujudkan pemberdayaan tenaga kerja disabilitas di Kota Mamasa

Dinas Sosial memiliki peran untuk ikut andil dalam kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah penyandang disabilitas. Memenuhi hak-hak yang semestinya mereka dapatkan merupakan langkah pemberdayaan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dalam kehidupannya membutuhkan dukungan agar mereka dapat memotivasi diri dan memiliki rasa percaya diri, dapat hidup mandiri dan hidup lebih baik di tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya. Dinas Sosial merupakan salah satu pelaku pemberdayaan tenaga kerja yang mendukung dan memotivasi para penyandang disabilitas agar mampu menjalani kehidupan kearah kemandirian dan memiliki rasa percaya diri. Ini dikarenakan kepercayaan diri dan kemandirian oleh penyandang disabilitas merupakan salah satu indikator dalam pemberdayaan. Bapak Lonni SE., M.Si selaku kepala Dinas Sosial Kota Mamasa dalam pengamatannya menjelaskan bahwa dari keadaan penyandang disabilitas khususnya di Kota Mamasa, masih banyak ketidakberdayaan yakni tidak mendapatkan hak seperti mendapat pekerjaan layakannya masyarakat pada umumnya, kemiskinan yang mereka alami serta banyak dari penyandang disabilitas yang merasa minder untuk bergaul di lingkungannya karena kurangnya rasa percaya diri. Jika melihat lebih dalam, mereka para penyandang disabilitas memiliki bakat dan keterampilan yang jika dikembangkan akan sangat berguna bagi mereka karena dapat dijadikan sebagai modal agar mereka bisa hidup lebih mandiri. Salah satu tugas dalam pemberdayaan adalah membantu memecahkan masalah seperti memberikan solusi dengan pemahaman dan mengikutkan pelatihan, menganalisis masalah dengan melihat keadaan dan kendala apa yang di alami penyandang agar dapat diketahui kebutuhan kedepan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat disabilitas dalam tatanan kehidupannya untuk menuju kesejahteraan.

Dengan keadaan dan kondisi penyandang disabilitas di Kota Mamasa ini, membuat Dinas Sosial mempertimbangkan dalam memberikan program dan kebijakan yang menyangkut penyandang disabilitas terutama untuk memberi kesempatan dalam bekerja. Dalam pra wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Sosial Kota Mamasa dengan Bapak Lonni mengatakan bahwa jumlah penyandang disabilitas fisik dan mental Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 871. Dengan ini, kami bertekad dan berusaha untuk memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat penyandang disabilitas. Tujuan dari pemberdayaan ini agar penyandang disabilitas mampu bangkit dari tidak berdaya menjadi berdaya, lebih percaya diri, dan bangkit agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Upaya pemahaman bahwa penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memerlukan interaksi dengan masyarakat lainnya karena pada dasarnya semua masyarakat baik disabilitas maupun nondisabilitas memiliki kesetaraan yang sama tanpa memandang suku, ras, agama, bahkan fisik sekalipun.

Berikut wawancara dengan Bapak Lonni SE., M.Si. D selaku Kepala Dinas Sosial terkait langkah awal pemberdayaan:

Pada tiap kecamatan terdapat lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Di LKS terdapat data-data penyandang disabilitas. Disinilah kita mendapatkan informasi berupa laporan bahwa terdapat penyandang disabilitas di kecamatan A contohnya. Selanjutnya kami melakukan kegiatan yaitu mengunjungi langsung untuk melihat kondisi dan melihat kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan, bagaimana cara keluarga dalam merawat, dan keadaan lingkungannya bagaimana, apakah pemerintah desa mengetahui keadaan tersebut. Dari sini kita mendapatkan data yang valid mengenai keadaan penyandang, sebagai contoh misalnya penyandang mengalami cacat fisik, maka dapat dilihat penyebab tersebut dapat berupa kedua orang tua yang menika terlalu mudah, atau ka faktor makanan, dan lain sebagainya.

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas yang terdapat pada Dinas Sosial Kota Mamasa yaitu penyandang disabilitas fisik dan mental. Dalam keadaannya penyandang disabilitas belum mendapatkan hak sepenuhnya. Dalam kesehariannya penyandang disabilitas membutuhkan wadah untuk membuka diri, karena mereka cenderung menyendiri dan sama sekali tidak berinteraksi bahkan mengetahui dunia luar. Ini dikarenakan rasa malu dengan keterbatasan diri sehingga menutup diri dari dunia luar serta pengaruh lingkungan keluarga yang tidak memberi izin untuk keluar. Melihat keadaan penyandang disabilitas tersebut maka perlu adanya perubahan kearah yang lebih baik. Dinas Sosial Kota Mamasa terus mengupayakan pemberdayaan yang dapat menjadi wadah untuk mewujudkan kemandirian dan rasa percaya diri bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian Dinas Sosial dalam pemberdayaan memiliki tuntutan dalam menganalisis masalah, memecahkan masalah, dan melihat peluang serta tantangan yang dihadapi masyarakat pada umumnya termasuk masyarakat penyandang disabilitas. Berikut adalah peran Dinas Sosial Kota Mamasa dalam pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Kebijakan Dinas Sosial Kota Mamasa

Mengenai kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Mamasa berupaya mencari solusi atas masalah yang di alami penyandang disabilitas. Ini dilakukan untuk semata-mata mengupayakan kesejahteraan dengan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berikut wawancara dengan Bapak Lonni SE., M.Si. D selaku Kepala Dinas Sosial terkait Kebijakan Dinas Sosial Kota Mamasa:

“Untuk mencapai pemberdayaan yang lebih baik tentunya perlu ada kebijakan yang serius. Kebijakan yang kami tetapkan yakni memberikan kesempatan dan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh akses pelayanan hak-hak dasar, membentuk dan mengembangkan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara horizontal maupun vertikal dan mengelola data base dan informasi dibidang sosial terkhusus penyandang disabilitas”

Berdasarkan wawancara di atas, Dinas Sosial Kota Mamasa dalam mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas menetapkan kebijakan yang menjadi acuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut yakni memberikan kesempatan dan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh akses pelayanan hak-hak dasar, membentuk dan mengembangkan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara horizontal maupun vertikal dan mengelola data base dan informasi dibidang sosial terkhusus penyandang disabilitas.

Kebijakan ini semata-mata dilakukan untuk mendukung tujuan pemberdayaan yang lebih baik. Lebih lanjut dijelaskan oleh salah satu staff Dinas Sosial Kota Mamasa.

Berikut wawancara dengan Ibu Helmi Pary S.E selaku salah satu staff Dinas Sosial terkait kebijakan untuk pemberdayaan pada Dinas Sosial Kota Mamasa:

“Sesuai kebijakan yang telah ditetapkan, maka kami selaku staff berusaha membantu dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada. Memberikan pelayanan terbaik kepada penyandang disabilitas kami usahakan agar mereka memperoleh hak-hak yang seharusnya. Bekerja sama dan menjalin koordinasi dengan baik antar pimpinan maupun lembaga-lembaga dan mengelola data base dan informasi terkait penyandang disabilitas sebaik mungkin”

Sesuai wawancara di atas, dijelaskan bahwa kerjasama yang baik dibutuhkan dalam mendukung berjalannya kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pemberdayaan penyandang disabilitas yang lebih baik. Dengan memberikan akses pelayanan yang baik kepada penyandang disabilitas agar dapat memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Berkerja sama dan menjalin koordinasi dengan baik antar pimpinan maupun lembaga-lembaga serta pengelolaan data base dan informasi terkait penyandang disabilitas. Maka dapat disimpulkan bawah Dinas Sosial Kota Mamasa telah membuat serangkaian rencana atau program serta keputusan berupa penetapan kebijakan untuk membantu dalam penyelesaian masalah penyandang disabilitas yang dihadapi. Kebijakan yang ditetapkan telah diimplementasikan dalam bentuk program pelayanan sosial untuk mencapai tujuan kesejahteraan.

Pelatihan Kemampuan

Keadaan dan perilaku penyandang disabilitas yang berbeda dan tidak umum kerap kali dianggap menyimpang. Dalam kondisinya, mereka sering tidak dihargai, bahkan dipandang sebagai orang yang lemah maka Dinas Sosial Kota Mamasa berusaha memperjuangkan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dengan mengupayakan program pemberdayaan dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yakni berfokus pada kewirausahaan dan sosialisai atau penyuluhan. Kewirausahaan ini yaitu dengan memanfaatkan barang-barang bekas untuk pembuatan kerajinan, program pelatihan menjahit dan menenun. Oleh karena itu, penyandang disabilitas fisik diikutkan pelatihan dengan mengikuti dan menekuni salah satu dari ketiganya. Apakah itu menjahit, menenun, atau mengolah barang bekas menjadi kerajinan. Ini karena mengingat penyandang disabilitas di Kota Mamasa yang terdata di Dinas Sosial adalah penyandang disabilitas fisik dan mental. Berikut wawancara dengan Bapak Lonni SE., M.Si. D selaku Kepala Dinas Sosial terkait program pemberdayaan dalam bentuk pelatihan:

”Untuk penyandang disabilitas fisik kita lebih kebanyakan mengikutkan pelatihan keterampilan menjahit, menenun dan membuat kerajinan dari barang bekas dengan bantuan memberikan peralatan seperti kursi roda bagi yang tidak bisa berjalan dan berupa uang untuk menunjang kebutuhan lain. Untuk yang penyandang disabilitas mental kami upayakan untuk melakukan pelatihan dengan memberikan sosialisasi seperti di ajak bicara terbuka, memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana agar dapat berintraksi dan tidak mengurung diri”.

Berikut wawancara dengan Bapak Lonni SE., M.Si. D selaku Kepala Dinas Sosial terkait program pemberdayaan dalam bentuk pelatihan:

Dinas sosial Kota Mamasa juga bekerja sama dengan Wirajaya Makassar untuk melakukan pelatihan selama 3 bulan kepada anggota penyandang disabilitas dalam mengembangkan kemampuan untuk menjahit. Dalam prosesnya penyandang disabilitas boleh diikutkan pelatihan keluar kota dengan memenuhi syarat tertentu

berupa maksimal umur 35 (produktif), belum berkeluarga, bisa membaca, mempunyai BPJS, mampu bereksperesi (kaki, tangan,) dan terdaftar dalam tenaga kesejahteraan sosial. Seperti pada tahun 2021 lalu kami mengirim 2 orang untuk pelatihan ke Wirajaya makassar selama 3 bulan. Salah satu Penyandang disabilitas tersebut atas nama Mitra yakni penyandang disabilitas tunawicara yang ikut pelatihan menjahit dan sekarang Mitra telah mengembangkan minat dan kembali untuk mengembangkan usaha mandiri dari rumah. Kemudian untuk pelatihan dari barang bekas dan pelatihan menenun, kami membuat program dan tempat pelatihan sendiri di Kota Mamasa. Program tersebut berupa daur ulang sampah plastik jadi kerajinan bunga hiasan, koran bekas untuk membuat bingkai foto, gantungan kunci dan program pelatihan menenun kain tradisional khas kabupaten Mamasa. Hasil dari daur ulang tersebut lalu dijual”

Pelatihan dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mamasa memiliki tujuan untuk memberikan bekal berupa kemampuan kepada para penyandang agar memiliki keterampilan dan kemampuan khusus. Dari pelaksanaan pelatihan dan upaya-upaya ini, dilakukan dengan maksud memberikan keterampilan untuk mendukung program pemberdayaan yang berkelanjutan. Dalam pemberdayaan harus dipahami bahwa pemberdayaan bagi masyarakat penyandang disabilitas tidak dimaksudkan untuk menggantungkan diri sepenuhnya kepada pemerintah. Namun lewat pemberdayaan tersebut diharapkan penyandang disabilitas menerima manfaat dan diharapkan bisa menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik dalam artian mempunyai kemampuan dalam kehidupan sehingga dapat berkembang dan menjadi mandiri. Maka dari itu setiap proses pemberdayaan harus totalitas agar penerima yang merasakan mampu untuk berusaha dan bekerja keras, mandiri, dan memenuhi kebutuhan sendiri.

Berikut wawancara dengan Bapak Lonni SE., M.Si. D selaku Kepala Dinas Sosial terkait hasil dari pemberdayaan:

“Sejauh yang saya amati, bagi penyandang disabilitas yang serius dalam mengikuti pelatihan mereka sudah mengembangkan skill yang didapat. Seperti menjahit contohnya saudara Mitra (penyandang disabilitas tunawicara) yang mengikuti pelatihan menjahit pada Wirajaya Makassar sekarang telah mengembangkan usaha menjahit dirumah. Usaha menjahit tersebut berupa mengolah kain khas tradisional Kota mamasa menjadi jas, dan kebaya. Sama halnya dengan penyandang yang telah mengikuti pelatihan membuat kerajinan dari barang bekas, mereka mengembangkan usaha mandiri dirumah lalu hasilnya dijual. Manfaat yang dirasakan tentunya lebih mandiri karena berpenghasilan sendiri dan otomatis tidak bergantung kepada orang lain”

Pernyataan bapak Lonni di atas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang sabar dan serius dalam mengikuti pelatihan menjadi lebih berkembang. Penyandang disabilitas tersebut sudah dapat mengembangkan skill yang didapatkan dengan mengembangkan sendiri dirumah. Manfaat dari pemberdayaan dalam bentuk pelatihan tentunya mendorong penyandang disabilitas agar lebih mandiri dan produktif. Manfaat dari pemberdayaan lebih lanjut disampaikan oleh salah satu penyandang disabilitas yang telah mengikuti pelatihan dari membuat kerajinan dari barang bekas.

Berikut wawancara dengan saudara Herman selaku penyandang disabilitas terkait manfaat yang dirasakan dari pemberdayaan:

“Setelah saya mengikuti pelatihan membuat kerajinan dari barang bekas, saya mengembangkan sendiri usaha dirumah dengan berfokus kepada pembuatan tas dari bekas botol minuman dan bekas gelas minuman. Hasilnya saya jual di pasar dan ada juga pembeli yang langsung datang kerumah, kadang juga ada yang pesan terlebih

dahulu. Hasil dari usaha ini yaa sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari”

Dalam penjelasan diatas dijelaskan bahwa pemberdayaan dalam bentuk pelatihan ini memiliki manfaat. Salah satunya adalah dari faktor ekonomi dengan mengikutkan pelatihan bagi mereka dan kemudian dari pelatihan tersebut penyandang bisa lebih mandiri dalam mengurus diri sendiri, bahkan produktif dan dapat berpenghasilan.

Berikut wawancara dengan Ibu Siska Sitandi selaku staff terkait manfaat dari pemberdayaan:

“Manfaat yang dihasilkan dari pemberdayaa ini salah satunya dapat mandiri. Kami selalu mengajarkan dan memberi pemahaman bahkan pemberdayaan ini bermanfaat seperti mandiri dalam segi mengurus diri dan mandiri dalam segi finansial yang artinya dapat berpenghasilan sendiri. Menyetarakan mereka dengan masyarakat normal pada umumnya dan memberi pemahaman bahwa kita semua ini sama hanya saja keterbatasan lingkungan. Kita memiliki hak dan kesempatan yang sama meskipun dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh penyandang disabilitas yang tidak bisa berjalan kan bisa menggunakan kursi roda untuk membantu berjalan, untuk yang tunawicara dapat menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi bahkan diluar sana banyak penyandang disabilitas yang mahir Bahasa ingris dengan menggunakan Bahasa isyarat“

Dijelaskan lebih rinci oleh ibu Siska Sitandi bahwa jelas terlihat perbedaan bagi penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan dan yang tidak ikut sama sekali. Penyandang yang ikut pemberdayaan lebih mandiri, mudah bergaul karena sikap percaya diri yang sudah tumbuh dalam diri mereka serta bersifat terbuka dengan dunia luar artinya terbuka dengan hal-hal yang baru. Penyandang disabilitas yang awalnya tidak memiliki kemampuan kini beruba menjadi terampil dalam artia memiliki pengetahuan praktis. Dengan bekal keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh, maka penyandang disabilitas lebih percaya diri. Percaya diri dalam hal ini mempunyai keyakinan yang tinggi bahwa mereka dapat mengurangi ketergantungan hidup dengan orang lain dan meningkatkan taraf hidup meskipun dalam kondisi yang terbatas jika dibanding dengan kebanyakan orang pada umumnya. Dalam pemberdayaan memiliki harapan yang paling ideal adalah penerima manfaat dapat bekerja secara mandiri dalam hal ini membuka usaha danmengelolanya sendiri. Di Kota Mamasa, harapan ideal ini dianggap perlahan dapat diwujudkan.

Pengembangan Jejaring

Dari uraian ini dapat dilihat bahwa tujuan dari pemberdayaan sudah tersampaikan bagi penyandang disabilitas yang sudah ikut pemberdayaan. Untuk selanjutnya Dinas Sosial Kota Mamasa terus berupaya mengembangkan pemberdayaan dengan melakukan pengembangan jejaring. Pengembangan jejaring ini sangat penting dalam pengembangan program-program pemberdayaan dan kesempatan peningkatan keberdayaan masyarakat.

Berikut wawancara dengan Bapak Lonni SE., M.Si. D selaku Kepala Dinas Sosial terkait pengembangan jejaring:

“Dalam keberlanjutan pemberdayaan yang telah dilakukan yaa salah satu upaya yang kami lakukan dengan terus berupaya mengembangkan dan mempertahankan jejaring bagi pemerhati penyandang disabilitas. Mengapa demikian karena ini dapat menjadi akses untuk meningkatkan keberdayaan mereka. salah satu contohnya adalah akses kepada pemerintah pusat. Menjadi menyambung informasi dari keadaan penyandang kepada pemerintah dan dengan menyampaikan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Pengembangan jejaring lainnya yaitu dengan bekerja sama dengan Lembaga-lembaga seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

yang terdapat disetiap Kecamatan, kepada Lembaga luar daerah seperti Wirajaya Makassar”

Dinas Sosial Kota Mamasa berupaya dalam mempertahankan dan mengembangkan jejaring agar mampu mendukung dan membantu dalam pemberdayaan tenaga kerja disabilitas khususnya mendukung program-program pemberdayaan. Dalam mendukung program pemberdayaan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Mamasa melakukan upaya dalam mengembangkan jejaring yang dapat menjadi akses bagi para penyandang disabilitas dengan para Lembaga dan organisasi pemerhati untuk meningkatkan keberdayaan mereka. dengan adanya pemerhati dari Lembaga-lembaga lain membuat Dinas Sosial Kabupaten Mamasa akan terbantu dalam pemberdayaan penyandang disabilitas yang lebih baik. Pengembangan jejaring salah satunya adalah kepada Lembaga-lembaga seperti Lembaga Kesejahteraan sosial, dan kepada Lembaga luar daerah seperti Wirajaya Makassar. Jaringan ini sangat penting dalam mendukung dan mengembangkan sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan serta dapat menjadi peluang bagi penyandang disabilitas agar mampu meningkatkan status berdaya mereka.

2. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Tenaga Kerja Disabilitas Di Kota Mamasa

Faktor penghambat

Dalam suatu proses pemberdayaan, akan pasti ditemukan suatu kekurangan dan keterbatasan, begitupun yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Mamasa meraskan kendala dalam pemberdayaan tenaga kerja disabilitas. Berikut wawancara dengan Bapak Lonni SE., M.Si. D selaku Kepala Dinas Sosial terkait penghambat Dinas Sosial dalam pemberdayaan :

“Yang menjadi penghambat ketika ada program yang akan diselenggarakan oleh Dinas Sosial adalah pemerintah setempat kurang memiliki data terkait masyarakat disabilitas. Bukan kami mengatakan bahwa tidak ada perhatian atau inisiatif karena mengingat memang terdapat beberapa hambatan yang dialami dilapangan. Sebagai contoh misalnya penyandang disabilitas yang mengalami tuna wicara, keluarga mereka menganggap bahwa sulit untuk mandiri karena tidak dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang lain seperti komunikasi pada umumnya. Mereka menganggap bahwa orang lain tidak akan mengerti apa yang dia maksud Ketika ingin berbicara. Ini dikarenakan kurangnya pengetahuan orang tua dan keluarga bahwa ada Bahasa isyarat yang dapat membantu mereka untuk berkomunikasi layaknya masyarakat pada umumnya. Melalui Dinas Sosial kami melakukan sosialisasi bahwa anak ini dapat dilatih menggunakan Bahasa isyarat yang sesuai standar agar mudah berkomunikasi”

Dalam prosesnya hambatan yang ditemui menurut yang dijelaskan oleh Bapak Lonni, penghambat Dinas Sosial dalam pemberdayaan yakni kurangnya rasa percaya diri penyandang disabilitas karena rendahnya tingkat pendidikan, pendidikan orang tua mengenai dunia disabilitas yang masih kurang sehingga belum paham betul mengenai anggota keluarga yang ternyata adalah penyandang disabilitas, terdapat banyaknya keluarga yang menolak dan malu mengakui anggota keluarga mereka adalah penyandang disabilitas, dan yang terakhir adalah kurangnya alat atau mesin bagi penyandang disabilitas yang sudah ikut pelatihan. Kurangnya data mengenai penyandang disabilitas. Sulitnya pendataan penyandang disabilitas menjadi masalah karena pemberdayaan akan menjadi tidak teratur dan menyeluru ke semua penyandang disabilitas. Jika terdapat data penyandang disabilitas seperti diketahui jumlah dan alamatnya, maka akan lebih mudah dalam sosialisasi dan melakukan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam hal ini sebaiknya Dinas Sosial Kota Mamasa meningkatkan dan

menfokuskan pendataan penyandang disabilitas ketiap-tiap daerah agar dapat dilakukan pemberdayaan secara menyeluruh dan merata. Dari beberapa uraian diatas mengakibatkan program yang telah dirancang menjadi terhambat dan tidak berjalan sesuai dengan program yang direncanakan. Sebagai contoh penyandang disabilitas sulit mengikuti pelatihan, meskipun dari penyandang disabilitas sendiri memiliki keinginan, namun dari keluarga sulit untuk mengizinkan karena dianggap tidak mampu dan memiliki rasa khawatir yang tinggi

Berikut wawancara dengan Ibu Reni selaku staff Dinas Sosial Kota Mamasa terkait hambatan Dinas Sosial dalam pemberdayaan:

“Hambatan pada saat advokasi dimasyarakat yaitu penolakan dari keluarga yang mengakibatkan penyandang disabilitas menjadi lebih tidak percaya diri. Padahal salah satu tujuan kita dalam program pemberdayaan adalah menumbuhkan sikap percaya diri kan. Pemahaman dan mainset orang tua dan keluarga terhadap penyandang disabilitas yaa cukup dikasihani dan diberikan bantuan langsung, cuma sebagai objek untuk dikasihani saja. Disini dapat dilihat bahwa dalam pemberdayaan faktor lingkungan berpengaruh besar. jika ingin melakukan pemberdayaan yaa yang diharus diahadapi juga adalah lingkungannya seperti yang paling terdekat yakni keluarga. Dari orang tua harus paham terlebih dahulu dan yang tahu lebih banyak tentang anaknya, cara merawat, kemampuan yang dimiliki anak tersebut. Lalu kemudian lingkungan sekitar sebagai pendukung saja. Untuk pemerintah tidak akan mengetahui anggota masyarakatnya yang mengalami difabel kalau tidak dilakukan pendataan dan melihat langsung kelapangan”

Sulitnya memberikan pemahaman kepada keluarga disabilitas merupakan salah satu hambatan dalam pemberdayaan. Sifat tertutup oleh orang tua dan keluarga mengenai salah satu anggota keluarga yang mengalami disabilitas. Ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman keluarga mengenai informasi disabilitas, rasa malu mengakui bahwa anggota keluarganya merupakan penyandang disabilitas. Sulitnya memberikan pemahaman pemberdayaan disabilitas kepada keluarga dan orang tua penyandang disabilitas dikarenakan mereka hanya menganggap penyandang disabilitas adalah objek yang tidak berdaya dan hanya bisa menerima bantuan saja. Pemberdayaan dilakukan untuk menjadikan individu atau kelompok menjadi lebih berdaya dan mandiri. Namun pihak keluarga hanya menganggap remeh dan beranggapan bahwa penyandang disabilitas hanya menggantungkan diri kepada orang lain.

Wawancara dengan Barto Lomeus Bongga Upa yang merupakan penyandang disabilitas fisik terkait kendala yang dialami:

“Dengan keadaan saya yang cacat fisik ini membuat saya tidak percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Keadaan yang tidak sama dengan orang pada umumnya membuat saya lebih baik dirumah saja dan tidak perlu keluar untuk bergabung”

Dalam menyikapi kendala tersebut Dinas Sosial berusaha menciptakan lingkungan sosial yang terbuka, ramah dan saling menghargai, masyarakat merasa aman, dan nyaman mendapatkan hak, dan melaksanakan kewajibannya. Namun pada praktiknya dan kenyataannya masih banyak para penyandang disabilitas yang tidak memperoleh hak bahkan terdiskriminasi dan terpinggirkan. Secara sosial dan hukum, dalam masyarakat, tidak seorang pun individu boleh dipelakukan lebih tinggi dan lebih rendah karena semua warga negara bersamaan kedudukannya. Ini jelas ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Lingkungan yang paling dekat dengan penyandang disabilitas yaitu keluarga sendiri yang dapat menjadi wadah untuk berekspresi justru menunjukkan ketidakpedulian bahkan menganggap remeh anggota keluarga yang disabilitas. Ini membuat penyandang disabilitas

merasa terpinggirkan dan membuat semakin tidak percaya diri. Human Rights Watch (2016) menemukan bahwa stigma serta penilaian dan perilaku negatif terhadap penyandang disabilitas tersebut mengakibatkan terjadinya internalisasi nilai-nilai dan stigma masyarakat ke dalam diri penyandang disabilitas. Kondisi ini makin diperparah dengan keterbatasan kapabilitas penyandang disabilitas, yang ditandai dengan kenyataan bahwa mayoritas penyandang disabilitas (63%) berpendidikan SD ke bawah. Konsekuensinya, kecenderungan penyandang disabilitas mengalami eksklusi, atau bahkan memisahkan diri dari interaksi dengan orang di sekitarnya, tidak bersekolah, dan tidak bekerja kondisi yang membuat penyandang disabilitas makin terjebak dalam posisi keberdayaan yang rendah. Dalam hal ini, Dinas Sosial sebaiknya meningkatkan dan mengupayakan sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat-manfaat pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Berikut wawancara dengan Ibu Siska Sitandi terkait kendala dalam pemberdayaan :

“Hambatan dalam pemberdayaan juga karena kurangnya alat dalam pelatihan, tempat yang nyaman dan memadai, serta kurangnya biaya. Seperti pada pelatihan menenun dan kelas membuat kerajinan dari barang bekas yang masih kekurangan bahan dan alat, akhirnya membuat kehadiran peserta kadang lengkap dan kebanyakan tidak lengkap bahkan tidak sampai setengah dari jumlah yang seharusnya. Ini kan dipengaruhi dari waktu yaaa, jadi peserta pelatihan tidak cepat mahir karena hanya ikut satu dua kali dan tidak menyelesaikan program.”

Dari Penjelasan di atas diketahui kendala pada saat melakukan program pemberdayaan yakni keterbatasan tempat yang nyaman dan strategis, biaya dan waktu yang dibutuhkan. Keterbatasan-keterbatasan ini akan membuat para penyandang disabilitas terhambat dalam pelatihan. Sama seperti pembelajaran yang harus terus diasa berulang agar terbiasa sampai mahir. Bagi penyandang disabilitas yang telah diikuti dalam pelatihan, juga tidak langsung dapat mempraktekkan ilmu yang mereka dapatkan karena tidak memiliki alat dan mesin. Berikut wawancara dengan saudara Eko Patrio terkait kendala yang dihadapi:

“Pelatihan yang saya ikuti adalah pelatihan membuat kerajinan dari barang bekas. Pada saat diawal saya bersemangat untuk mengikutinya, namun lama kelamaan saya hanya ikut satu atau dua kali seminggu karena terkadang kita hanya datang ditempat pelatihan tetapi tidak melakukan apa-apa karena kurangnya alat dan bahan akhirnya membuat saya jenuh”

Penjelasan di atas menguraikan bahwa penyandang disabilitas hanya ikut satu atau dua kali mengikuti pelatihan dikarenakan rasa jenuh ditempat pelatihan tanpa kegiatan. Kurangnya alat dan bahan dalam pelatihan membuat para penyandang disabilitas merasa bosan.

Faktor Pendukung

Dalam pemberdayaan, faktor pendukung sangat di butuhkan agar mendorong kelancaran serta keberhasilan proses pemberdayaan. Faktor ini menjadi kunci dalam pemberdayaan dan harus terjaga demi keberlangsungan proses pemberdayaan. Adapun faktor pendukung dalam pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kota Mamasa. Berikut wawancara dengan Bapak Lonni SE., M.Si. D selaku Kepala Dinas Sosial terkait faktor pendukung dalam pemberdayaan :

“Dalam pemberdayaan memang diperluksn faktor pendukung agar pemberdayaan lebih mudah dilaksanakan. Dalam prosesnya kami merasakan dukungan dari pemerintah pusat dalam memberikan sumbangan dan mengusahakan program-program pemberdayaan. Faktor pendukung lainnya yaitu adanya semangat yang tinggi dari pengurus dinas Sosial Kabupaten mamasa yang selalu tanggap dan

mengusahakan kebutuhan-kebutuhan para penyandang disabilitas. Dukungan dari Lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang senantiasa membantu dalam pendataan penyandang disabilitas ditiap-tiap daerah serta Lembaga-lembaga luar daerah seperti Wirajaya Makassar yang ikut bekerja sama. Dukungan lainnya yaitu berasal dari lingkungan, serta kadang terdapat relawan mahasiswa contohnya yang kebetulan ada kegiatan khusus pelatihan disabilitas. Faktor yang mendukung juga kan dari penyandang disabilitas sendiri yang memiliki skill dan kemampuan untuk diasia lebih jauh yang terakhir adalah antusias dari penyandang disabilitas sendiri.”

Dalam pemberdayaan faktor pendukung sangat dibutuhkan agar dapat menunjang kelancaran serta keberhasilan program dalam pemberdayaan. Faktor pendukung ini menjadi kunci dan kekuatan suatu pemberdayaan. Maka dari itu harus terus dijaga demi keberlangsungan jangka Panjang. Faktor pendukung dalam pemberdayaan memegang peran penting demi keberhasilan program pemberdayaan. Faktor pendukung memegang peran penting dalam keberlangsungan pemberdayaan jangka panjang. Pemerintah pusat adalah salah satu pendukung dalam proses pemberdayaan tenaga kerja disabilitas. Dengan selalu mengusahakan setiap program berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan berupa pemberian bantuan kuris roda bagi penyandang disabilitas yang tidak dapat berjalan, bantuan berupa uang untuk menunjang kebutuhan kebutuhan lainnya. Dukungan dari relawan yang menjadi pemerhati nasib penyandang disabilitas, seperti relawan mahasiswa dari berbagai kampus atau dari masyarakat umum. Relawan ini sedikit memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada penyandang disabilitas.

Antusiasme dari pihak penyandang disabilitas berupa tanggapan positif terhadap Dinas Sosial atas program-program yang telah diselenggarakan. Kebijakan program bantuan, dan pelatihan membuat penyandang disabilitas baik individu maupun kelompok merasa terbantu dan merasakan manfaatnya. Dengan demikian Dinas Sosial merasa terbantu dengan dukungan tersebut untuk tetap berusaha dalam pemenuhan hak-hak disabilitas agar tercapai keadilan dalam tatanan masyarakat. Sikap tanggap dari team Dinas Sosial Kota Mamasa dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas juga merupakan faktor pendukung. Keberhasilan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak lepas dari perencanaan program kerja baik, pengetahuan, dan pemahaman dan ketetapan sasaran untuk memahami kebutuhan khususnya keadaan penyandang disabilitas. Dinas Sosial Kota Mamasa tanggap dalam memahami kebutuhan penyandang disabilitas terbukti dengan adanya bantuan-bantuan, dan selalu mengusahakan program-program pelatihan yang menunjang pemberdayaan tenaga kerja disabilitas.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Mamasa memiliki peranan penting dalam pemberdayaan tenaga kerja disabilitas. Dalam implementasinya Dinas Sosial Kota Mamasa telah berperan dalam melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas seperti menetapkan kebijakan, pelatihan, dan pengembangan jejaring. Peran pertama, dengan menetapkan kebijakan-kebijakan seperti memberikan kesempatan dan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh akses pelayanan hak-hak dasar, membentuk dan mengembangkan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara horisontal maupun vertikal dan mengelola data base dan informasi dibidang sosial terkhusus penyandang disabilitas. Peran kedua, yaitu mengikutkan pelatihan menjahit, menenun dan pelatihan membuat kerajinan dari barang bekas bagi penyandang yang memenuhi syarat ikut pelatihan. Peran ketiga, pengembangan jejaring dengan bekerja sama dengan Lembaga-lembaga seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terdapat di setiap Kecamatan, kepada Lembaga luar daerah

seperti Wirajaya Makassar dan Jogjakarta. Walaupun demikian program pemberdayaan disabilitas di Kota Mamasa dapat dikatakan belum maksimal dikarenakan beberapa hambatan-hambatan atau kendala yang ditemui pada saat pemberdayaan dilapangan.

Dinas Sosial Kota Mamasa dalam pemberdayaan tenaga kerja disabilitas, dipengaruhi oleh faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat tersebut yaitu kurangnya data penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial, mindset orang tua dan keluarga yang menganggap pemberdayaan itu tidak penting serta kurangnya alat dan mesin dalam mendukung penyandang disabilitas yang telah ikut pelatihan. Selanjutnya faktor pendukung yaitu semangat yang tinggi dari pengurus Dinas Sosial Kota Mamasa yang selalu tanggap dan mengusahakan kebutuhan-kebutuhan para penyandang disabilitas. Dukungan dari Lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang senantiasa membantu dalam pendataan penyandang disabilitas di tiap-tiap daerah serta Lembaga-lembaga luar daerah seperti Wirajaya Makassar yang ikut bekerja sama. Dukungan lainnya yaitu berasal dari lingkungan, serta dukungan relawan mahasiswa contohnya yang kebetulan ada kegiatan khusus pelatihan disabilitas. Faktor yang mendukung juga kan dari penyandang disabilitas sendiri yang memiliki skill dan kemampuan untuk diasia lebih jauh yang terakhir adalah antusias dari penyandang disabilitas sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M. 2014. "Media Pembelajaran Masyarakat Modern." *Jurnal Teknodik* 4 Nomor 1:54–62.
- Maita, dan Subhan. 2018. "Peningkatan Keterampilan Motorik Halus Melalui Kegiatan Kerajinan Tangan." *Tunas Cendekia: Jurnal Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1(1):1–14.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2017. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rianto, Dwiko Maxi. 2017. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Sentra Kriya Oleh Rumah Pintar Atsiri Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor."
- Rijali, Ahmad. 2019. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17(33):81. doi: 10.18592/alhadharah.v17i33.2374.
- Sudarto. 2016. "Keterampilan Dan Nilai Sebagai Materi Pendidikan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al Lubab* Vol.2 No.1. doi: <https://doi.org/10.19120/al-lubab.v2i1.1305>.
- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka